

Implementasi Kaidah Fiqhiyah Dalam Perkara Dispensasi

Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai salah

satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister (S-2)

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah



Oleh:

Muhamad Rizki

503210035

PROGRAM MAGISTER

PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PONOROGO

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya, **Muhamad Rizki, 503210035**, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **"Implementasi Kaidah Fiqhiyah Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan"** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 02 April 2023

Pembuat Pernyataan,



Muhamad Rizki

NIM: 503210035

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhamad Rizki**
NIM : **503210035**
Program Studi : **Ahwal Syakhsiyyah**
Judul Tesis : **Implementasi Kaidah Fiqhiyah Dalam
Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan
Agama Pacitan)**

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2023

Penulis,



Muhamad Rizki

NIM 503210035

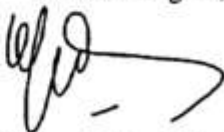
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Muhamad Rizki**, NIM: 503210035 dengan judul: “**Implementasi Kaidah Fiqhiyah Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan**)”, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqashah tesis.

Pembimbing I,


Dr. Miffahul Huda, M.Ag.,
NIP. 197605172002121002

Ponorogo, 05 April 2023
Pembimbing II ,


Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP. 197711112005012003



KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Muhamad Rizki**, NIM: **503210035**, Program **Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: "**Implementasi Kaidah Fiqhiyah Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan**". Telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari **Selasa, 09 Mei 2023** dan dinyatakan **LULUS**

Dewan Penguji

No	NamaPenguji	Tanda tangan	Tanggal
1	Nur Kholis, Ph.D. NIP. 197106231998031002 Ketua Sidang		9/6/23
2	Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag NIP. 197308011998310001 Penguji Utama		9/6/23
3	Dr. Miftahul Huda, M.Ag. NIP. : 197605172002121002 Anggota Penguji		9/6/2023
4	Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 197711112005012003 Sekretaris Sidang		9/6/23

Ponorogo,
Direktur Pascasarjana

Dr. Muh. Fawzi, M.Ag
NIP. 197401081999031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penelitian tesis yang berjudul **“Implementasi Kaidah Fiqhiyah Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan)”** ini. Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum M.H. pada Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Isteri tercinta

Yuhasnawati, dan anak-anakku semua atas dukungan support sehingga kuliah strata 2 dapat diselesaikan tepat waktu.

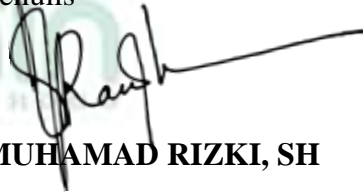
Terima kasih juga disampaikan kepada pembimbing tesis yang saya banggakan, yaitu Dr. Miftahul Huda, **M.Ag** dan Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag., yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian Penulis selama menyusun tesis dari awal hingga selesai.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Ponorogo, Dr. Hj. Evi Muawiyah, M.Ag., Direktur Pascasarjana Dr. Muh. Tasrif, M.Ag., Ketua Program Studi Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tak lupa pula, Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi IAIN Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat

yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya tesis ini. Akhirnya, Penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah Penulis yang dinilai saleh di sisi Allah SWT., dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul Penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan masyarakat bangsa, amin.

Ponorogo, 5 Juni 2023

Penulis



MUHAMAD RIZKI, SH

NIM 503210035

ABSTRAK

Permohonan dispensasi kawin jumlahnya terus meningkat, padahal pernikahan di bawah umur sangat beresiko, banyak penelitian yang menjelaskan dampak buruk akibat dari pernikahan dini.¹ Pada hal ini menjadikan dilema bagi Pengadilan Agama Pacitan antara mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti akan meneliti dengan menggunakan ketiga rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana pandangan hakim terhadap kaidah fiqhiyah sebagai pertimbangan hukum dalam menangani perkara diska di Pengadilan Agama Pacitan, *Kedua*, Bagaimana hakim menerapkan kaidah fiqhiyah dalam menangani perkara diska di Pengadilan Agama Pacitan, dan yang *Ketiga*, Bagaimana Implikasi penerapan kaidah fiqhiyah dalam putusan hakim pada perkara diska di Pengadilan Agama Pacitan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik triangulasi data. Hasil dari penelitian bahwa kaidah fiqhiyah yang sering digunakan adalah tiga kaidah yaitu *Menolak Kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan, Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan dan Kemadharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemadharatan yang bersifat umum.*

Kata Kunci: Implementasi, fiqhiyah, Dispensasi Kawin

¹ Web Pengadilan Agama Pacitan diakses 05 Oktober 2022.

ABSTRACT

The number of applications for marriage dispensation continues to increase, even though underage marriages are very risky, many studies explain the adverse effects of early marriage. In this case, it creates a dilemma for the Pacitan Religious Court between granting or rejecting the application for marriage dispensation. Departing from these problems, the researcher will examine using the three problem formulations as follows: First, how do judges view the Fiqhiyah rule as an argument or legal consideration in handling disc cases in the Pacitan Religious Court, Second, how do judges apply the Fiqhiyah rule in handling disc cases in court? Religion of Pacitan, and Third, what are the implications of the application of Fiqhiyah principles to judge decisions in handling disc cases at the Pacitan Religious Court. In this study, researchers used qualitative research methods using data triangulation techniques. The results of the study show that the fiqhiyah principles that are often used are three rules, namely Rejecting Damage must take precedence over bringing benefit, harms allow prohibitions and special harms must be borne to avoid general harms.

Keywords: *Implementation, fiqhiyah, Marriage Dispensation*

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman *translitierasi* yang digunakan Penulis dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab.	Ind.	Arab.	Ind.	Arab.	Ind.
ء	,	د	D	ض	D	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	Z	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	H	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	s	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf *a*, *i* dan *u*.
3. Bunyi hidup dobel (*diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “*ay*” dan “*aw*”.

Contoh: *Bayna*, ‘*layhim*, *qawl*, *mawd{u>’ah*

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi, transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

- a. *Ibn Taymi>yah* bukan *Ibnu Taymi>yah*.
 - b. *Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m* bukan *Inna al-di>na ‘inda Alla>hi al-Isla>mu*.
 - c. *Fahuwa wa>jib* bukan *fahuwa wa>jibu* dan bukan pula *fahuwa wa>jibun*.
5. Kata yang berakhir dengan *ta>’marbu>t{ah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *id{a>fah* ditransliterasikan dengan “*ah*”. Sedangkan *mud{a>f* ditransliterasikan dengan “*at*”.

Contoh:

a. *Na'at dan mud{a>f} ilayh : Sunnah sayyi'ah, alMaktabah al-Mis{riyah.*

b. *Mud{a>f} : mat{ba'at al-'A>mmah.*

6. Kata yang berakhir dengan *ya>'* mushaddadah (*ya>'* bertashdid) ditransliterasikan dengan *i>*. Jika *i>* diikuti dengan *ta>'marbu>t{ah* maka transliterasinya dengan *i>yah*. Jika *ya>'* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

a. *Al-Ghaza>li>, al-Nawawi>*

b. *Ibn Taymi>yah, Al-Jawzi>yah*

c. *Sayyid, mu'ayyid, muqayyid*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.....	1
B.. Fokus Penelitian	6
C.. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E.. Kajian Terdahulu	8
F. . Metode Penelitian.....	12
G. Tehnik Analisis Data	15
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : KAJIDAH *FIQHIYAH* DAN *MAQASID SHARI'AH*

A. Kaidah <i>Fiqhiyah</i>	21
B.. Macam-Macam <i>Kaidah Fiqhiyah</i>	23
C.. <i>Maqasid Shari'ah</i>	29

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Pacitan	45
B. Prosedur Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Pacitan.....	48
C. Pengaturan Pemberian Dispensasi Menikah di Pengadilan Agama.....	51

BAB IV: PANDANGAN HAKIM TERHADAP KAJDAH FIQHIYAH SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA DISKA DI PENGADILAN AGAMA PACITAN

- A. Data Hasil Wawancara Tentang Pandangan Hakim Terhadap Kaidah Fiqhiyah Sebagai Argumentasi Atau Pertimbangan Hukum Dalam Menangani Perkara Diska Di Pengadilan Agama Pacitan.....60
- B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Perkara Diska Di Pengadilan Agama Pacitan menurut Kaidah Fiqhiyah 71

BAB V: METODE HAKIM DALAM MENERAPKAN KAJDAH FIQHIYAH DALAM MENANGANI PERKARA DISKA DI PENGADILAN AGAMA PACITAN

- A. Data Hasil Penelitian Tentang Metode Hakim Menerapkan Kaidah Fiqhiyah Dalam Menangani Perkara Diska Di Pengadilan Agama Pacitan..... 80
- B. Analsis Metode Hakim Menerapkan Kaidah Fiqhiyah Dalam Menangani Perkara Diska Di Pengadilan Agama Pacitan menurut Kaidah Fiqhiyah 88

BAB VI: IMPLIKASI DARI PENERAPAN KAJDAH FIQHIYAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENANGANI PERKARA DISKA DI PENGADILAN AGAMA PACITAN

- A. Data Implikasi Dari Penerapan Kaidah Fiqhiyah Terhadap Putusan Hakim Dalam Menangani Perkara Diska Di Pengadilan Agama Pacitan..... 91

B. Analisis Implikasi Dari Penerapan Kaidah Fiqhiyah Terhadap Putusan Hakim Dalam Menangani Perkara Diska Di Pengadilan Agama Pacitan menurut Tujuan Kaidah Fiqhiyah.....	103
---	-----

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Sarab-saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

01. <i>Daftar Pertanyaan</i>	116
------------------------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut data yang disajikan oleh aplikasi “*peta perkara*” Pengadilan Agama Pacitan, diperoleh data sebagai berikut² :

Jumlah perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Pacitan

TAHUN	JUMLAH
2019	157
2020	369
2021	371
Januari – Oktober 2022	211

Permohonan dispensasi kawin jumlahnya terus meningkat sejak perubahan Undang undang perkawinan yang menaikkan usia pernikahan menjadi 19 tahun, padahal

² . Diakses tanggal 5 Oktober 2022 dari web pa pacitan.

pernikahan di bawah umur sangat beresiko, banyak penelitian yang menjelaskan dampak buruk akibat dari pernikahan dini. Seperti pada penelitiannya Rifia menjelaskan bahwa pernikahan dini berdampak secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akal baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak. Selain dampak biologis juga berdampak pada psikis anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan.³

³ Fatma Amalia, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 8, no. 2 (2009): 201.

Dari data penelitian terdahulu tentang dampak buruk dari pernikahan dini memang memberikan peringatan bahwa pernikahan dini tidak baik dilaksanakan. Seorang yang ingin menikah harus menunggu dewasa terlebih dahulu. Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Pacitan pernikahan dini tidak dapat dicegah dengan cara tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah oleh pengadilan akantetapi karena pernikahan dini berawal dari kesalahan berhubungan lawan jenis sehingga menyebabkan hamil dan kemudian terpaksa mereka harus menikah.

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya:⁴

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya” (HR. Bukhari no. 5056, Muslim no. 1400).

⁴ Ibid.

Pasca lahirnya Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, maka orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat "*mendesak*" disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dan telah mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa "*perlindungan dan kepentingan terbaik anak*" adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam dispensasi kawin⁵.

Berbagai alasan diajukan oleh para pemohon dispensasi antara lain *Pertama*, telah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai, *Kedua*, takut terjerumus hubungan seks bebas, *Ketiga*, sudah sering keluar jalan berdua, *Keempat*, takut melanggar norma sosial/adat dimana pada

⁵ Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 287/Pdt.P/2022 dan 288/Pdt.P/2022

setiap daerah memiliki norma sosial/ada yang berbeda-beda, *Kelima*, Kedua calon pengantin telah melakukan hubungan badan yang belum terikat perkawinan yang sah, *Keenam*, Calon pengantin perempuan telah hamil¹.

Alasan 1- 4 adalah alasan yang biasa (banyak dilakukann oleh anak anak muda), masih mungkin untuk diadakan pembinaan oleh keluarganya sehingga tak perlu nikah usia anak-anak, namun untuk alasan 5 dan 6 (telah melakukan hubungan badan dan apalagi telah hamil diluar nikah) adalah alasan yang dapat dikategorikan "*mendesak*", keadaan telah hamil merupakan masalah yang harus disikapi dan dipertimbangkan untuk memberikan kepastian hukum, setidaknya bagi calon pengantin dan juga janinnya.

Dari berbagai alasan pengajuan Dispensasi Kawin tersebut, Hakim dalam memproses kasus tersebut tidak serta merta mengabulkan permohonan. Banyak pertimbangan yang dijadikan dasar dalam mengabulkan permohonan, dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pacitan banyak yang menukil kaidah kaidah Fiqhiyah (*kaidah fikih*) sebagai landasan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Dan

bahkan dengan mencantumkan *maqoosidul-Shariah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifd al din*), perlindungan jiwa-raga (*hifd al nafhs*), perlindungan keturunan (*hifd al nasl*), perlindungan harta (*hifd al mali*), dan perlindungan akal (*hifd al aql*).

Berangkat dari kasus diatas maka peneliti ingin meneliti tentang bagaimana Implementasi Kaidah Fiqhiyah Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap kaidah Fiqhiyah sebagai argumentasi atau pertimbangan hukum dalam menangani perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan ?
2. Bagaimana hakim menerapkan kaidah Fiqhiyah dalam menangani perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan ?
3. Bagaimana Implikasi dari penerapan kaidah Fiqhiyah terhadap putusan hakim dalam menangani perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, Setelah terjawab atas kajian rumusan masalah tersebut, maka para pembaca diharapkan dapat:

1. Mengetahui pandangan dan pemikiran hakim terkait dengan kaidah Fiqhiyah yang banyak dipakai dalam putusan perkara Dispensasi Kawin.
2. Mengetahui metode ijtihad (*turuqul ijtihad*) utamanya ijtihad tatbiqi dalam perkara Dispensasi Kawin.
3. Mengeahui pengaruh kaidah Fiqhiyah terhadap penolakan atau pengabulan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Harapan dari penelitian ini mampu memperkaya keilmuan tentang penggunaan kaidah Fiqhiyah dan dapat memberikan sumbangan bagi para hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat umumnya dan para pembaca penelitian sadar tentang meningkatnya pernikahan dini bukan merupakan dari faktor kurang tegasnya hukum akan tetapi dipengaruhi oleh pergaulan remaja yang rusak.

E. Kajian Terdahulu

Pembahasan mengenai tinjauan pustaka dalam penelitian ini perlu untuk dicantumkan. Karena dengan adanya kerangka teori peneliti mengupayakan sebuah analisis terhadap suatu data untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang ada tidak diadopsi seluruhnya, tetapi akan dilakukan penyesuaian dan tidak menutup kemungkinan adanya reduksi data, perubahan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya dengan konsep lain yang lebih akurat dan tepat, atau membuang pandangan-pandangan teoritik atau temuan peneliti lain yang diyakini kurang relevan lagi dan diganti dengan pandangan teoritik lain yang lebih relevan.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mentari Gemilang dengan judul *Dispensasi Kawin Di Bawah Umur*

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0060/Pdt.P/2015/Pa.Pbr). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Penetapan dispensasi kawin Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.Pbr yaitu calon istri anak Pemohon yang berusia 17 tahun sudah hamil lima bulan. Hakim mengabulkan permohonan karena keadaan yang sangat mendesak dan kerusakannya lebih besar jika permohonan dispensasi kawinnya ditolak yaitu dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁶

Kedua, Jurnal yang di susun oleh Rizkiyah Hasanah, dengan judul *Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Shari'ah*. Metode penelitian jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menetapkan dispensasi kawin akibat hamil pra-nikah berdasarkan pertimbangan hukum yuridis (berdasarkan aturan

⁶ “*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0060/Pdt.P/2015/Pa.Pbr) Oleh: Mentari Gemilang*” III, no. 0060 (2015): 1–13.

perundangan yang berlaku), berdasarkan pertimbangan hukum Islam dan berdasarkan pertimbangan keadilan masyarakat. Penetapan hakim tersebut ditinjau dari aspek *maqashid Shari'ah* Islam dari segi kemaslahatannya adalah lebih mengutamakan *hifz al-nasl*, sedangkan dari segi mafsadatnya *hifz al-din* tidak tercapai yaitu terjadi pelanggaran syari'at Islam tentang larangan zina dengan menjadikan KHI Pasal 53 sebagai legalitas kawin hamil akibat zina.⁷

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Divya Novindasari, dengan judul *Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin*. Dalam jurnal tersebut Dasar pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan kedua belah pihak sudah menyatakan kesiapan dan kesanggupan menjalin

⁷ Rizkiyah Hasanah, "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah Rizkiyah Hasanah Hakim Pengadilan Agama Jember ,Tujuan Pernikahan Baik Menurut Hukum Positif Yaitu Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ma," *Aktualita* 1, no. 1 (2018): 295–311.

hubungan rumah tangga, hubungan keduanya sudah sangat erat yang dikhawatirkan terjadi kemudharatan (zina).⁸

Keempat. Tesis yang disusun oleh Ita Sofianingrum, dengan judul *Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif Ham Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Tesis tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari data putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu yang dijadikan rujukan utama. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa faktor terbesar penyebab sejumlah masyarakat Indramayu mengajukan dispensasi nikah adalah karena alasan hamil terlebih dahulu, pergaulan intim dan khawatir terjadi perbuatan yang terlarang serta telah mendapat restu dari orang tua dan keluarga. Terdapat tiga pasal yang mendasar yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, yaitu Pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 89 UU

⁸ D Novindasari, PR Listyawati - Prosiding Konstelasi Ilmiah, and undefined 2021, "Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin," *Jurnal.Unissula.Ac.Id*, no. 2 (2021): 60–73, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/17895>.

No. 3 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam pemberian dispensasi nikah terhadap wanita yang sudah hamil tidak melanggar undang-undang karena bertujuan untuk menyelamatkan nyawa anak yang dikandung dan psikis ibu yang mengandung. Sedangkan dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, dispensasi nikah diantaranya melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.⁹

Dari beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah di pengadilan dengan pertimbangan kemaslahatan. Sementara penelitian yang akan kami teliti tentang bagaimana Implementasi kaidah *Fiqhiyah* dalam dispensasi kawin yaitu penelitian ini lebih mengarah pada penggunaan-penggunaan

⁹ Rizkiyah Hasanah, “*Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari ’ Ah* Rizkiyah Hasanah Hakim Pengadilan Agama Jember A . PENDAHULUAN Tujuan Pernikahan Baik Menurut Hukum Positif Yaitu Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .”

kaidah *Fiqhiyah* sebagai dasar mengabulkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa.¹⁰ Jenis penelitian metode kualitatif dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah tersebut.

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah orang atau sekelompok orang yang dijadikan sasaran penelitian dan dapat

¹⁰ T. Fatimah Djajasudarma, *MetodeLinguistik (Ancangan Metode Penelitian dan Kajian)*,(Bandung: Refika Aditama, 2006): 11

memberikan informasi. Informan pada penelitian ini dari Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah berkas-berkas putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung kepada informan, seperti mewawancarai Hakim yang memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Sedangkan, sumber data sekunder merupakan literatur seperti hasil penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal, dan referensi lain yang mendukung tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara.

Wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Pacitan antara lain Nurhabibah, Abdurrahman, Munirul Ikhwan, untuk mendapatkan keterangan, dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung terhadap peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang di *interview* bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas dapat diulang dan diarahkan yang lebih bermakna.¹¹ Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini melibatkan pewawancara dengan yang diwawancarai berbicara dengan santai tanpa adanya daftar pertanyaan yang resmi, namun masih dalam lingkup penggunaan kaidah *fiqhiyah* dalam pengkabulan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

¹¹ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003): 82.

notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹² Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari arsip perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pacitan dengan Nomor Perkara No.113/Pdt.P/2021/PA.Pct.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Selain itu, observasi dilakukan guna memperkuat data yang telah terkumpul melalui wawancara maupun dokumentasi. observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu obseravsi non pasrtisipan. Dimana penulis hanya bertindak sebagai penonton atau hanya mengamati proses jalannya sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: PT. Rinekan Cipta, 2002): 206.

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:¹³

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, member kode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data informasi yang tidak relevan.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Display data merupakan pendeksripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian ini juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel, dan bagan.

c. Verivikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Verivikasi merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2003): 246-253.

menemukan makna data yang telah disajikan. Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya melalui metode wawancara yang telah didukung dengan studi dokumen.

5. Keabsahan Data

Dalam upaya pengecekan keabsahan data, memiliki banyak metode yang ditempuh untuk mengetahui, bahwa data yang diperoleh adalah *real* seperti yang terjadi dilapangan, yaitu seperti uji kredibilitas data, yang memiliki beberapa poin dan cara pengujian yang ada di dalamnya.

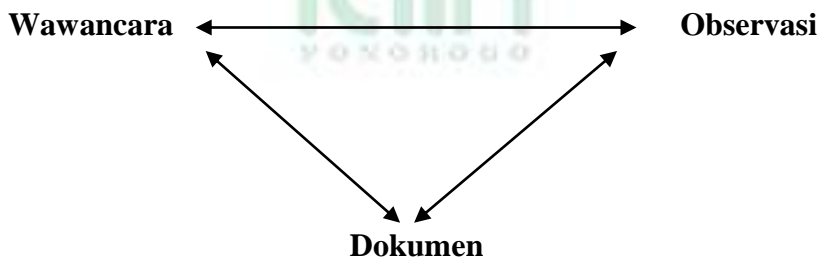
Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu cara untuk menguji keabsahan data, yaitu teknik triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant obervation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan

atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Peneliti merasa perlu menggunakan teknik ini, karena langsung dapat direkomendasikan dari hasil pengumpulan data penelitian, ketika berada dilapangan. Pengecekan sumber data yang menggunakan triangulasi sumber data dengan pengecekan dari beberapa sumber, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang selajutnya diminta kesepakatan ddengan beberapa sumber data tersebut. Adapun skema gambar triangulasi sumber data adalah sebagai berikut:

Gambar 1

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data



H. Sistematika Pembahasan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut dan sistematis, maka peneliti membagi pokok bahasan menjadi empat bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas, mempermudah pembaca pada setiap permasalahan yang dikemukakan.

Adapun perincian setiap bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang, rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kajian Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II dalam bab ini menjelaskan pemaparan Teori tentang *al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Tasyri'iyah* dan bagaimana penggunaannya dalam memutuskan perkara dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Berisi tentang Visi Misi Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, Standart Oprasional Prosedur di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, Letak Geografis dan Struktur Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

BAB IV berisi tentang Pandangan Hakim Terhadap Kaidah Fiqhiyah Sebagai Argumentasi Atau Pertimbangan Hukum Dalam Menangani Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan.

BAB V berisi tentang Metode Hakim Dalam Menerapkan Kaidah *Fiqhiyah* Dalam Menangani Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan

BAB VI berisi tentang Implikasi Dari Penerapan Kaidah Fiqhiyah Terhadap Putusan Hakim Dalam Menangani Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan

BAB V Penutup. Merupakan akhir dari pembahasan ini yang berisi kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

KAIDAH *FIQHIYAH* DAN *MAQASID SHARI'AH*

A. Kaidah *Fiqhiyah*

kaidah *Fiqhiyah* disebut juga Kaidah *Istinbathiyah* atau Kaidah *Lughowiyah*. Disebut Kaidah *Istinbathiyah* karena kaidah - kaidah tersebut dipergunakan dalam rangka mengistinbatkan hukum-hukum Syara' dari dalil-dalilnya yang terperinci. Disebut Kaidah *Lughawiyah* karena kaidah ini merupakan kaidah yang dipakai ulama berdasarkan makna, susunan, gaya bahasa, dan tujuan ungkapan -ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa arab, setelah diadakan penelitian-penelitian yang bersumber dan kesusastraan arab.

Dalam kajian ushul fiqh pembahasan penting biasanya menyangkut dua aspek ketika usaha-usaha untuk menemukan hukum sesuatu dilakukan. Dua aspek itu adalah (1) pendekatan dalam istinbath hukum, dan (2) metode ijtihad yang digunakan. Dua aspek ini merupakan sarana penting bagi para fuqaha dalam menentukan hukum dan di sisi lain terkadang memberikan perbedaan yang cukup

signifikan terhadap hasil pemikiran antara satu faqih dengan lainnya.

Dalam konteks pendekatan, Abdul Karim Zaidan memaparkan terdapatnya dua pendekatan dalam istinbath, yaitu (a) pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan; dan (b) pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud *Shari'ah* (*maqashid al-Shari'ah*). Qaidah-qaidah kebahasaan digunakan karena menyangkut nash (teks) *Shari'ah*, sementara pendekatan melalui *maqashid al-Shari'ah* digunakan karena menyangkut kehendak Syar'I yang dapat diketahui melalui kajian *maqashid ash-Shari'ah*.¹⁴

Ruang lingkup kaedah bahasa (*lughawy*) itu mengacu pada empat segi yang sebagai berikut:

- a. Kepada *lafazh-lafaz nash* dari segi kejelasan dan kekuatan dalalah-nya terhadap pengertian yang dimaksud.
- b. Dari segi ungkapan dan konotasinya, apakah menggunakan ibarat yang sharih (ungkapan yang jelas), atautkah menggunakan isyarat yang mengandung makna

¹⁴ Abdul Aziz M. Azzam, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah*, (Kairo:Daar al-Hadits, 2005): 41.

yang tersirat; dan apakah memakai manthuq ataukah mafhum

- c. Dari segi cakupan lafazh dan sasaran dalalah-nya, berupa lafadz umum dan lafadz yang khusus, dan lafaz muqayyad atau mutlaq.
- d. Dari segi bentuk runtutan(*sighat taklif-nya*).¹⁵

B. Macam-Macam Kaidah Fiqhiyah

Kaidah-kaidah fiqh induk (*al-qawaid al-asasiyah*). Disebut induk, karena banyak kaidah-kaidah cabang yang dapat dikembalikan atau diproyeksikan kepadanya. Kaidah-kaidah fiqh induk antara lain sebagai berikut:

1. Kaidah Induk Pertama

الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا

Artinya: “Segala perkara tergantung dengan niatnya”
(as-Suyuthi, t.,t.:6)

¹⁵ Said al-Khin, Mustafa, Atsaru Al-Khilaf Al-Qawaid Al-Ushuliyyah Fi Al-Ikhtilafi Al Fuqaha, (Beirut, muassasah ar-risalah 1998): 7.

SKEMA Kaidah Induk Pertama
Dan beberapa kaidah cabangnya



2. Kaidah Induk Kedua

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: “*Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan*” (as-Suyuthi, t.t:37)

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *al-yaqin* (yakin) dalam kaidah di atas adalah: Sesuatu yang pasti, berdasarkan pemikiran mendalam atau berdasarkan dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan *asy-syakk* (ragu): Sesuatu yang keadaannya belum pasti (*mutaraddid*), antara kemungkinan adanya dan tidak adanya, sulit dipastikan mana yang lebih kuat dari salah satu kedua kemungkinan tersebut.



**SKEMA Kaidah Induk Kedua
Dan Beberapa Cabangnya**

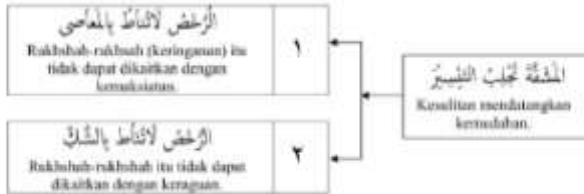


3. Kaidah Induk yang Ketiga

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ

Artinya: Kesulitan mendatangkan kemudahan.

SKEMA Kaidah Induk Ketiga
dan Beberapa Cabangnya



4. Kaidah Induk Keempat

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: *Bahaya harus disingkirkan*



**SKEMA KATAH INDUK KEEMPAT
DAN BEBERAPA CABANGNYA**



5. Kaidah Induk yang Kelima

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.*

SKEMA Kaidah Induk Kelima
DAN BEBERAPA CABANGNYA



C. MAQASID SHARI'AH

1. Pengertian *Maqasid Shari'ah*

Maqashid *Al-Shariah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (مقاصد) dan *al-Shariah* (الشريعة). Dalam pembahasan ini kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.

a. Maqashid

Kata maqashid (مقاصد) (adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal maqshid (مقصد) dan imaqshad (امقصد), (keduanya berupa masdar mimi yang punya bentuk fi'il madhi qashada قصد. Secara bahasa maqashid ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad, al-um, ityan asy-syai*, (dan juga *istiqamatu at-tariq*. Selain dari makna di atas, ibn al-Manzur menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-'ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).¹⁶

¹⁶ Busyro, *Maqashid Al-shariah*, (Jakarta: Kencana, 2019): 6-7

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestillah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.¹⁷

b. *Al-Shariah*

Kata *al-Shariah* secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-din*, *al-millah*, *al-*

¹⁷ Busyro, *Maqashid Al-shariah* : 7.

minhaj, (*at-thariqah*, dan *as-sunnah*).¹⁸ Adapun kata *al-Shariah* secara bahasa berarti mauid *al-maalladzi tasyra''u fihi al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana).

Seperti dalam hadis Nabi, *fa asyra''a naqatahu*, artinya *adkhalaha fi al-Shariah al-ma* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra''uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).

Pemakaian kata *al-Shariah* dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-jaatsiyah [45]; 18 yang berbunyi: ُ

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Al-shariah* ,: 14.

Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Jaatsiyah; 18)

Selain itu juga berdasarkan QS. Al-maaidah [5]: 48: ۞

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ

Artinya: kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya).Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang.Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja).Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan.Hanya kepada Allah kamu

semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. (QS. Al-maaidah: 48)

Pemakaian kata *al-Shariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa *al-Shariah* manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Dengan demikian, maqashid *al-Shariah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW. Secara terminologi, Al-Ghazali misalnya, di dalam AlMustashfa hanya menyebutkan ada lima maqashid *al-Shariah* , yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.

Namun demikian, definisi maqashid *al-Shariah* hanya akan kita temukan hanya akan kita temukan pada karya ulama modern.

1) Ibnu Asyur

Di antara ulama modern adalah Ibnu Asyur (w. 1393 H). Maqashid *al-Shariah* beliau di definisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus. Definisi Maqashid *Al-Shariah* yang umum menurut Ibnu Asyur: Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat *al-Shariah* pada semua *al-Shariah* atau sebagian besarnya. Hal-hal yang dikehendaki syar'i (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.¹⁹

2) *Allal Al-Fasi*

Allal Al-Fasi (w. 1974 M) membuat definisi maqashid *al-Shariah* adalah: Maqashid *al-Shariah* adalah tujuan *al-Shariah* dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari' yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum hukumnya.

3) *Ar-Raisuni*

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Al-shariah* ,: 14.

Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh *al-Shariah* demi untuk kemaslahatan hamba.

4) *Wahbah Az-Zuhaili*

Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa maqashid *al-Shariah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syar'ī dalam setiap hukum yang ditetapkanNya.

Dengan demikian, maqashid *al-Shariah* itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara', dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam maqashid *al-Shariah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.

Keberadaan maqashid *al-Shariah* , sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan

mujtahid (*ijma'*). Dari sisi *ijma'* dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat. Maqashid *al-Shariah* yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar.

Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalildalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habishabisnya. Tanpa mengetahui maqashid *al-Shariah* hukum islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri.

2. Prinsip-prinsip Maqashid Al-Shariah

Maqashid *al-Shariah* terdiri dari dua kata, yaitu maqashid yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *al-Shariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasyid syari'ah yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁸⁰ Tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikankebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *haji*y, dan *tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *al-Shariah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.

- 1) al-maqasyid ad-daruriyat, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi

berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan

- 2) *Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin. Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas

daruriyat secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori daruriyat ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *daruriyat* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajiyyat*. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari daruriyat dan di akhiri oleh *tahsiniyyat*.²⁰

- 4) Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan

²⁰ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020): 44.

seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut:

- a) Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
- b) Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
- c) Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
- d) Mendukung realisasi masyarakat daruriyyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari *maqashid as-shariah*, sebagai berikut:
 1. Mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah *tasyri'* baik yang umum maupun khusus.

2. Menegaskan karakteristik islam yang sesuai dengan tiap zaman.
3. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat islam.
4. Mempersempit perselelisihan dan ta'ashub di antara pengikut mazhab *fiqh Syari'* dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke mafsadatan bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada mashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash-nya.

3. Konsep *Maqasid Shari'ah*

Konsep maqasid al-*Shari'ah* sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis

dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashalih al-‘ibad), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi maqasid al-*Shari’ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada suatu ‘illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut al-Syatibi membagi Maqasid menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqasid dharuriyat*, *Maqasid hajiyat*, dan *Maqasid tahsiniyat*. Dharuriyat artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. Hajiyat maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. Tahsiniyat artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. Dharuriyat beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : (1) menjaga agama (*hifz ad-din*);

(2) menjaga jiwa (*hifz an-nafs*); (3) menjaga akal (*hifz al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*hifz an-nasl*); (5) menjaga harta (*hifz al-mal*).

Maqasid al-*Shari'ah* terdiri dari dua kata yakni maqasid dan al-*Shari'ah*. Maqasid adalah jamak dari maksud yang berasal dari fiil qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqasid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.²¹ Sedangkan *Shari'ah* berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber keadilan⁴ dan jalan menuju sumber kehidupan.²²

4. Hubungan Maqasid al-*Shari'ah* dengan beberapa Metode Ijtihad

Sebagaimana telah dijelaskan, pada dasarnya tujuan utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Pencarian para

²¹ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid. VIII (Beirut: Dar al-Sadr, t.th): 175.

²² Fazlur Rahman, *Islam, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad*, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka, 1994): 140.

ahli ushul fiqih terhadap al-maslahah atau kemaslahatan itu diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai macam istilah telah digunakan oleh mereka untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan kemaslahatan umat manusia, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Alquran maupun dalam hadis. Atas dasar asumsi ini maka dapat dikatakan, bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqih beruara pada al-maqasid al-*Shari'ah*.

Metode istimbat hukum dengan menggunakan qiyas dan *maslahah al-mursalah* ataupun yang lainnya adalah metode yang dapat digunakan dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan atau dikaitkan dengan maqasid al-*Shari'ah* sebagai dasar untuk memperoleh kemaslahatan yang hendak dicapai dalam hukum yang ditetapkannya. Misalnya metode qiyas²³ baru bisa dilaksanakan apabila dapat ditentukan maqasid al-*Shari'ah* yaitu dengan cara menemukan illat hukum

²³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997): 135-136.

dari sebuah permasalahan hukum. Contoh hukum tentang khamar adalah karena sifatnya yang dapat memabukkan dan bisa merusak akal manusia, dengan demikian yang menjadi illat hukum khamar adalah memabukkan dan merusak akal. Khamar adalah hanya salah satu contoh dari sekian banyak hal yang memiliki kesamaan sifat dengannya. Terlebih dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini maka sangat banyak sifat-sifat dari zat-zat kimiawi yang memiliki kesamaan sidat dan fungsi dengan khamar di atas. Dari sini dapat dilihat betapa erat hubungan antara metode qiyas dengan maqasid al-*Shari'ah*. Para ahli ushul fiqih mengelaborasi keterkaitannya, menurut mereka illat baru bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum setelah diketahui dan ditelusuri maksud disyari'atkannya hukum itu. Dalam menentukan maksud dan tujuan hukum, tidak dapat diabaikan pemahaman tentang maslahat dan mafsadat yang menjadi inti kajian *maqasid al-Shari'ah*.²⁴

²⁴ Sya'bani, A. *Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Metode Ijtihad. El-Hikam*, 8(1) (2015): 127-142.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Pacitan

1. Sejarah Singkat

Pengadilan Agama Pacitan dibuat berdasarkan Staatblad tahun 1882 Nomor 152 tempat kedudukannya di ibu kota Kabupaten dengan alamat lama di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2 Pacitan Telepon/Faximile (0357) 881098. Pengadilan Agama Pacitan menempati gedung permanent dengan type Kelas IB, dengan luas bangunan 250 m² dibangun di atas tanah seluas 415 M². Bahwa Pengadilan Agama Pacitan berdiri pada Tahun 1969 pada mulanya bertempat di jalan Samanhudi selama 5 tahun kemudian pindah di jalan Ahmad Yani dengan menyewa Koperasi KPN dari tahun 1974-1979 selanjutnya pengadilan Agama Pacitan pindah lagi menduduki gedung baru pada tahun 1979 sampai tahun 2010. Kemudian pada awal tahun 2011 Pengadilan Agama Pacitan menempati gedung baru yang representatif dan beralamat di jalan K.S. Tubun No. 9 Pacitan telp (0357) 884345 fax (0357) 884380. Letak geografis Kabupaten Pacitan antara 111 0 06 0 bujur timur dan 08 0 112 0 lintang selatan dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah

utara Kabupaten Ponorogo, sebelah timur Kabupaten Trenggalek, sebelah selatan Samudra Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Wonogiri.²⁵

2. **Visi dan Misi**

a. Visi .

Terwujudnya Pengadilan Agama Pacitan Yang Agung.

b. Misi

- 1) Menjaga kehormatan Pengadilan Agama Pacitan;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pacitan;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pacitan.

3. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Agama Pacitan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat

²⁵ Pengadilan Agama Pacitan, “*Tentang Pengadilan*”, dalam <https://www.pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan> ,

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pacitan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan Penetapan Ahli Waris untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan lain sebagainya;
- 2) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 3) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilanlainnya;

- 4) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaandaneksekusi;
- 5) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dankeuangan kecuali biaya perkara);
- 6) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orangyang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukumIslam
- 7) sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-UndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhanhukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitiandansebagainya.

B. Prosedur Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Pacitan

1. Izin Kawin

- 1) Pemohonan izin melangsungkan perkawinan diajukan oleh calon mempelai yang belum berusia 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orang tuanya kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- 2) Pemohonan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilalrukan secara kumulatif kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- 3) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan izin melangsungkan perkawinan setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya
- 4) Permohonan izin melangsungkan perkawinan bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.
- 5) Terhadap penetapan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau wanita, dapat dilakukan perlawanan oleh orang tua calon mempelai,

keluarga dekat dan/atau orang yang berkepentingan lainnya kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mengeluarkan penetapan tersebut.

2. Dispensasi Kawin

Calon suami atau istri yang belum mencapai usia 19 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

- 1) Permohonan Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun atau calon mempelai wanita yang belum berusia 19 tahun kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- 2) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.

- 3) Pengadilan Agama atau Mahkamah *Syar'iyah* dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
- 4) Pemohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

C. Pengaturan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Dispensasi kawin atau sering juga disebut dispensasi nikah adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus. pemberian izin untuk tidak melakukan suatu kewajiban atau larangan. pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.²⁶ Dispensasi usia perkawinan merupakan pengurangan terhadap standar normatif yang diatur oleh UU mengenai batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan

²⁶ Telly Sumbu, et.al., Op.Cit: 157

perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 yaitu laki laki dan perempuan adalah 19 tahun, Jika seorang laki-laki dan perempuan berusia di bawah 19 tahun dan ingin melangsungkan perkawinan, maka yang bersangkutan harus meminta dispensasi kawin terlebih dahulu ke pengadilan.

Bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama sedangkan yang non Islam di Pengadilan Negeri. Sebagaimana ditentukan dalam UU :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 “(1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya

²⁷ Indonesia, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. 1 LN. No. 1 tahun 1974, TLN. No. 3019, Pasal 7.

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 dan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”²⁸, namun sesuai UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa usia perkawinan adalah sekurang kurangnya 19 tahun (laki dan perempuan sama), Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 (Permenag No. 3 tahun 1975) ditentukan; “Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami dan atau yang belum mencapai umur 19 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. (permenag No.3/1975 pasal 1(2) sub g). Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 19 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria mupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

²⁸ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991, Pasal 15.*

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.²⁹ Di dalam UU perkawinan selain dispensasi perkawinan mengenai calon mempelai yang masih dibawah umur, ada hal-hal lain yang memerlukan izin Pengadilan Agama terutama tentang penyimpangan terhadap syarat-syarat perkawinan. Keadaan-keadaan yang memerlukan izin dari Pengadilan Agama diatur dalam pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 dan perubahannya antara lain :

1. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya

²⁹ Indonesia, *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama, Peraturan*

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal adanya perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Izin Pengadilan Agama yang dimaksud dalam pasal 6 ini juga menyangkut umur calon mempelai. Bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Izin kedua orang tua merupakan salah satu aspek yang penting. hal ini dikarenakan ukuran kedewasaan

menurut Kitab UU Hukum Perdata (BW) adalah apabila seseorang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Sehingga mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dianggap belum dewasa dan masih memerlukan izin kedua orang tuanya dalam melakukan tindakan hukum, termasuk dalam hal ini melangsungkan perkawinan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan pengajuan dispensasi menikah sebagai berikut:

1. Kehendak nikah ditolak oleh KUA Setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu setiap perkawinan khususnya bagi mereka yang beragama Islam harus mendaftarkan ke KUA yang mewilayahinya tempat tinggalnya. Namun apabila dalam pemeriksaan terdapat larangan atau persyaratan yang tidak lengkap maka pihak KUA berhak menolak melangsungkan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:
 - 1) Jika PPN berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut UU ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
 - 2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan

perkawinan oleh PPN akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut sesuai dengan alasan-alasan penolakannya.”³⁰

Dalam hal ini yang menjadi alasan penolakan pihak KUA dikarenakan calon mempelai masih di bawah umur. Selanjutnya ayat 3 dan 4 Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa:

- 1) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana PPN yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
 - 2) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.”²⁰
2. Berhubungan cukup lama dan sulit dipisahkan Kedua calon mempelai telah kenal cukup lama dan sulit sekali untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai, untuk

³⁰ Indonesia, Undang-undang Perkawinan, Undangundang No. 1 LN. 1 tahun 1974, TLN. No. 3019, Pasal 21 ayat 1 dan 2.

menghindari akibat yang lebih jauh seperti pergaulan bebas jalan satu-satunya adalah melakukan pernikahan secepatnya, hal ini juga untuk menghindari kehamilan di luar nikah.

3. Kehamilan sebelum nikah Yang dimaksud disini adalah hamilnya seorang wanita yang belum bersuami atau belum melakukan pernikahan. Kehamilan sebelum nikah merupakan faktor penyebab yang sangat berpengaruh dan sebagai alasan utama. Dipakainya sebab hamil sebelum jikah tersebut maka orang tua calon mempelai perempuan bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan maksud agar tidak malu kepada masyarakat.
 - 1) seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
 - 2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa mengganggu lebih dulu kelahiran anaknya.

- 3) Dengan dilangsungkannya pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan yang setelah anak yang dikandung lahir.³¹

Dari pasal tersebut di atas jelas bahwa perkawinan wanita hamil tidak dilarang, dan perkawinannya telah sah, serta tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

4. Keduanya sudah saling mencintai Pada dasarnya manusia yang hidup mempunyai rasa cinta yang salah satunya adalah rasa saling mencintai antar sesama, yaitu antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksudkan disini adalah upaya manusia yang mempunyai rasa saling mencintai untuk dapat mewujudkan pada suatu ikatan perkawinan. Diharapkan dengan rasa saling mencintai akan terbina keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa, “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan

³¹ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991, Pasal 53.

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

22

5. Suami sudah mampu bertanggungjawab Dalam sebuah rumah tangga seorang suami adalah kepala keluarga, maka ia wajib melindungi dan memberikan apa yang terbaik bagi keluarganya. “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dari ayat tersebut diatas jelas bahwa seorang suami mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap keluarganya dalam memenuhi kebutuhan spiritual maupun materiil, sehingga sikap tanggungjawab sangat diperlukan dalam membangun sebuah rumah tangga.
6. Tidak ada halangan untuk menikah Yang dimaksud di sini adalah bahwa calon mempelai tidak ada hubungan darah maupun ikatan yang dilarang hukum ataupun agama masing-masing untuk menikah sebagaimana yang tersebut dalam pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 dan perubahannya.
7. Kedua calon mempelai telah setuju untuk menikah Suatu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat perkawinan

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 Alasan-alasan tersebut di atas dianggap layak untuk dikabulkan kaena tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.



BAB IV
PANDANGAN HAKIM TERHADAP KAIDAH
FIQHIYAH SEBAGAI ARGUMENTASI ATAU
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENANGANI
PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA PACITAN

A. Data Hasil Wawancara Tentang Pandangan Hakim Terhadap Kaidah Fiqhiyah Sebagai Argumentasi Atau Pertimbangan Hukum Dalam Menangani Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan

Dalam penelitian ini peneliti menggali informasi terkait kaidah fiqhiyah yang banyak digunakan dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Tujuan peneliti menggali informasi tersebut sebagai bahan analisis supaya memiliki terkaitan dengan judul penelitian yang telah peneliti buat. Terdapat lima kaidah fiqhiyah induk dan pada setiap induk memiliki cabang masing-masing. Kaidah tersebut dapat membantu para penentu kebijakan atau muhakam yang bertugas memutuskan segala persoalan berdasarkan hukum-hukum yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan dasar

kaidah-kaidah Fiqhiyah yang berjumlah 5 kaidah induk dan 40 kaidah cabangnya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur dengan informan ahli sebagai sumber data pokok penelitian kemudian selain informan ahli peneliti juga menggunakan informan pembanding sebagai bahan triangulasi data dari data yang peneliti peroleh dari informan ahli. Selain itu dalam melakukan triangulasi peneliti juga menggunakan triangulasi data dengan menggunakan salinan putusan dari Pengadilan Agama Pacitan yang mengabulkan atau menolak perkara tentang dispensasi kawin di Kabupaten Pacitan.

Pemilihan informan ahli ini berdasarkan alasan-alasan tertentu. *Pertama* Informan yang mengetahui langsung atau menjalani langsung tentang permohonan dispensasi kawin, *Kedua*, informan yang bertugas mencari dalil-dalil sebagai pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Adapun daftar informan ahli sebagai berikut:

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN
1	Nurhabibah	Hakim Pengadilan Agama Pacitan
2	Miswan	Hakim Pengadilan Agama Pacitan
3	Munirul Ihwan	Hakim Pengadilan Agama Pacitan

Selain informan ahli peneliti juga menggunakan informan pembanding. Pemilihan informan pembanding berdasarkan beberapa alasan *pertama*, orang yang mengetahui langsung proses penyelesaian permohonan dispensasi kawin. *Kedua* orang yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Adapun informan pembanding sebagai berikut :

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN
1	Wahyudin	Panitera Pengadilan Agama Pacitan
2	Tri Yani	Yang Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan
3	Sri Mutianingsih	Yang Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan

		Agama Pacitan
4	Indah nur Pratiwi	Yang Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan
5	Arinta ani prayogi	Yang Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu pertanyaan kepada informan yaitu Kaidah Fiqhiyah yang banyak di gunakan dalam perkara dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan ?

Menurut informan ahli oleh Nurhabibah kaidah yang sering digunakan dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak Kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Seperti yang dijelaskan oleh Nurhabibah:

“Kaidah yang sering dipakai dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah yaitu Dar’ul mafasid Muqodamu ‘ala Jalbi Masholih. Kaidah ini memang sering kami gunakan karena kami melihat apabila permohonan dispensasi kawin tersebut tidak kami kabulkan maka akan terjadi kemadlaratan pada pihak wanita yang kondisinya sudah hamil dan juga anak yang dilahirkannya akan tidak memiliki ayah ataupun penanggungjawab kehidupannya sehingga hal ini lebih memprihatinkan dan dapat menjadi sebuah kehidupan yang mengarah kesengsaraan”.³²

Selain itu peneliti melakukan wawancara kepada informan ahli yang kedua yaitu Miswan selaku hakim yang memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan menurut Miswan kaidah yang sering digunakan dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan yaitu :



الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : *Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan.*

Seperti yang dijelaskan oleh Miswan :

³² Nurhabibah, Pukul 14.20 WIB Rabu, 19 Oktober 2022, Wawancara, di Pengadilan Agama Pacitan

“begini pak kaidah yang sering kami gunakan itu ad-dhorurotu tubihul mahdhuroti yang artinya kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan karena hampir pada setiap orang yang mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama dikarenakan sudah hamil duluan padahal dalam hukum islam tidak diperbolehkan menikahkan wanita yang hamil anjurannya menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu akantetapi kami mengabulkan dispensasi kawin tersebut dengan dasar apabila tidak kami kabulkan maka dikawatirkan pihak laki-laki tidak akan bertanggungjawab atas wanita yang dihamilinya.”³³

Terdapat perbedaan antara informan pertama dan kedua. Padahal kasus yang mereka alami sama-sama yaitu orang yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan sudah hamil diluar nikah akantetapi mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Informan pertama menggunakan dasar *“kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”* dasar kaidah ini digunakan karena melihat orang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan dengan alasan sudah hamil dan tidak ada yang menjadi penanggungjawab wanita dan anak

³³ Miswan, Pukul 15.20 WIB Rabu, 19 Oktober 2022, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Pacitan

yang dilahirkannya padahal sudah menjadi hal biasa dan keharusan bahwa wanita hamil harus di nafkahi oleh suaminya dan juga anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya berupa makanan, pakaian bahkan susu untuknya. Ketika sang ibu tidak dapat melaksanakan hal tersebut maka harus dibantu oleh suaminya sebagai bentuk nafkah untuknya. Konteks permasalahan yang dialami oleh informan kedua yaitu orang yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan sudah hamil padahal menikahkan orang yang sudah hamil hukumnya tidak diperbolehkan menurut hukum islam akantetapi hakim yang mengabulkan perkara tersebut menggunakan dalil ”*Kemadhartan-kemadharatan itu membolehkan larangan*” dengan dalil ini maka hakim tersebut mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut dengan alasan putusan tersebut sebagai tali ikatan untuk sang laki-laki agar bertanggungjawab terhadap istri dan anak yang dikandungnya.

Dari hasil wawancara terhadap kedua informan tersebut selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan ketiga yaitu Munirul Ihwan selaku hakim Pengadilan Agama Pacitan yang menyelesaikan permohonan dispensasi kawin

menurut Munirul Ihwan kaidah Fiqhiyah yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mengabulkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan yaitu :

يُتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

Artinya: *Kemadharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemadharatan yang bersifat umum.*

Seperti yang dijelaskan oleh Munirul Ihwan sebagai berikut:

“dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin kami menggunakan kaidah Kemadharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemadharatan yang bersifat umum hal ini kami gunakan sebagai dasar pengabulan permohonan dispensasi kawin dikarenakan kasus yang kami tangani dikarenakan orang yang mengajukan dispensasi kawin dikarena terpergok oleh masyarakat dikarenakan melakukan hubungan diluar nikah sementara umur mereka dibawah umur apabila mereka tidak segera menikah maka akan menjadikan masalah sosial di masyarakat sehingga kami menggunakan kaidah tersebut untuk mengabulkan dispensasi kawin tersebut. Kemadharatan yang khusus harus ditanggung daripada kemadharatan yang bersifat umum”³⁴

³⁴ Munirul Ihwan, Pukul 15.20 WIB Rabu, 19 Oktober 2022, Wawancara, di Pengadilan Agama Pacitan

Dari hasil wawancara kepada informan yang ketiga ini memiliki perbedaan kaidah yang digunakan dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Hal ini dikarenakan perbedaan kasus yang mereka tangani, penggunaan kaidah “*Kemadharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemadharatan yang bersifat umum*” merupakan dasar yang tepat untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan kasus yang mereka alami.

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada informan ahli yaitu hakim yang menangani kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan peneliti menarik kesimpulan terdapat 3 (tiga) kaidah Ushul Fiqhiyah yang sering digunakan dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Ketiga Kaidah Tersebut antara lain :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak Kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : *Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan.*

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

Artinya: *Kemadharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemadharatan yang bersifat umum.*

Ketiga kaidah tersebut selanjutnya peneliti triangulasi menggunakan jenis triangulasi metode. Triangulasi metode merupakan cara membandingkan data informan ahli terhadap kepada informan pembanding untuk mengecek kebenaran dari sebuah data yang peneliti peroleh dari informan ahli.

Dalam hal ini peneliti menggunakan informan pembanding dari pihak panitera dan juga orang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Seperti yang dijelaskan menurut Wahyudin selaku panitera Pengadilan Agama Pacitan sebagai berikut:

“dalam penyelesaian permohonan dispensasi kawin para hakim menggunakan dasar-dasar kaidah fiqhiyah sebagai acuan dalam mengabulkan perkara

*permohonan dispensasi nikah tersebut. Dan kaidah-kaidah yang sering digunakan tentang kaidah mendahulukan kemaslahatan daripada mengambil kemaslahatan, dan juga kaidah-kaidah lainnya yang dalam lingkup cabang dari kaidah2 darurat harus dihilangkan”.*³⁵

Hasil dari wawancara dengan informan pembanding dengan salah satu panitera yang mengikuti proses persidangan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan dalam hal ini menurutnya kaidah-kaidah yang sering digunakan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah adalah kaidah cabang dari kaidah induk الضَّرْرُ يُزَالُ cabang dari kaidah tersebut berjumlah 10 kaidah dan ketiga kaidah hasil wawancara dengan informan ahli diatas termasuk cabang dari kaidah tersebut maka informan pembanding pertama menyatakan bahwa adanya kesamaan kaidah yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah kaidah cabang dari الضَّرْرُ يُزَالُ .

³⁵ Wahyudin15.21 WIB 26 oktober 2022, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Pacitan.

Setelah melakukan wawancara kepada informan pembeding kepada panitera yang ikut dalam persidangan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan selanjutnya wawancara dengan informan pembeding yaitu dengan orang atau pihak yang mengajukan perkara dispensasi nikah tersebut yaitu dengan Tri Yani. Seperti yang dijelaskan oleh Tri Yani bahwa :

“kalau menurut saya kurang paham itu dalil dari kaidah fiqih apa dari qur’an. Tetapi yang saya dengar itu Cuma hakim memutuskan bahwa kasus saya dikabulkan dengan alasan karena akan terjadi kemadharatan apabila saya tidak menikah dengan suami saya.”³⁶

Dari hasil wawancara kepada informan pembeding kedua terdapat kesamaan yaitu kaidah yang digunakan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan yaitu kaidah tentang *“Kemadharatan itu harus dihilangkan”*.

Dari hasil proses triangulasi metode yang peneliti gunakan dalam mengecek kebenaran informasi dari informan ahli yang peneliti tentukan maka dapat menjawab rumusan

³⁶ Tri Yani. Pukul 12.13 WIB, 26 Oktober 2022 , *Wawancara*, di Kantin Pengadilan Agama Pacitan

masalah pertama tentang kaidah-kaidah Fiqhiyah apa saja yang digunakan dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan maka terdapat 3 (tiga) Kaidah yaitu

Kaidah Pertama

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak Kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Kaidah Kedua

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : *Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan.*

Kaidah Ketiga

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدْفَعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

Artinya: *Kemadharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemadharatan yang bersifat umum.*

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan menurut Kaidah Fiqhiyah dan Kaidah Fiqhiyah

Pada tahapan ini peneliti menganalisis tentang pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan. Yang mana dijelaskan pada Buku Panduan Peradilan Agama yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Tugas Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Termasuk juga pada penyelesaian perkara perkawinan Pengadilan Agama memberikan izin Dispensasi Kawin bagi calon mempelai yang dibawah umur.³⁷

Sesuai dengan tugas hakim yaitu menyelesaikan perkara yang masuk di wilayah Pengadilan Agama sesuai dengan wewenangnya Absolut dan relative maka dengan ini

³⁷ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Direktorat Jendral Peradilan Agama, 2011): 231

hakim ditugaskan untuk memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-undang yang berlaku.³⁸

Pada penyelesaian perkara dispensasi kawin pada tahapan ini hakim melakukan ijtihad dengan menggunakan banyak pertimbangan. Hakim dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.³⁹ dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan pertimbangan hukum hasil ijtihad hakim antara lain: pertimbangan sosiologis, pertimbangan masa depan anak, pertimbangan psikologis, pertimbangan jaminan yang pasti dan kuat dalam hidup berumah tangga, dan pertimbangan kematangan mental dan kaidah fiqhiyyah. Pertimbangan tersebut digunakan hakim untuk mewujudkan kemaslahatan. Proses penemuan hukum dalam perkara dispensasi nikah melalui tiga tahapan, yakni tahap konstatir, kualifisir, dan

³⁸ Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2018): 73-92.

³⁹ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Direktorat Jendral Peradilan Agama, 2011): 231

konstituir. Adapun metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah dengan menggunakan metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi gramatikal, sistematis, konstruksi hukum, dan masalah mursalah.⁴⁰

Pada konteks penelitian ini peneliti menentukan fokus penelitian pada pandangan hakim terhadap penggunaan kaidah Fiqhiyah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Sesuai dengan teori Ushul Fiqh dua aspek yang digunakan dalam usaha penemuan hukum yaitu pendekatan *Istinbath* hukum dan metode ijtihad hukum. Pada pendekatan istinbath hukum juga menggunakan dua metode yaitu dengan pendekatan kaidah atau kebahasaan dan yang kedua menggunakan pengenalan makna atau *Maqasid Al-Shariah*.

Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan bahwa hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin dengan menggunakan

⁴⁰ Luqman Haqiqi Amirulloh, *Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah, Khuluqiyya*, Vol 3 No 1 Januari 2021

Istinbath Hukum dengan metode pengenalan makna atau *Maqasid Shari'ah*. Terdapat lima tujuan dari *Maqasid Shari'ah* yaitu dengan melindungi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Para hakim Pengadilan agama mempertimbangkan dengan melindungi kelima aspek tersebut sesuai dengan urutannya yaitu didahulukan dari melindungi agama. Alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan melindungi agama ketika calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi kawin maka mereka dikawatirkan akan melakukan perbuatan dosa yang terus menerus. Selain itu dalam upaya melindungi jiwa ketika hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin maka dikawatirkan dapat melakukan upaya bunuh diri dikarenakan kondisi mereka sudah hamil. Selanjutnya pertimbangan hakim menjaga keturunan apabila hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut pasangan calon mempelai yang sudah saling mencintai dikawatirkan dapat melakukan zina akibat terlalu lama menunggu nikah sehingga dapat melahirkan anak hasil perzinaan. Selanjutnya pada upaya melindungi jiwa dan harta hakim pengadilan agama pacitan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan

alasan ketika tidak di kabulkan maka akan terjadi depresi bagi calon mempelai yang sudah hamil diluar nikah.

Selain itu juga pertimbangan hakim yang digunakan yaitu menggunakan beberapa kaidah Fiqhiyah antara lain:

Kaidah Pertama

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak Kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Alasan hakim pengadilan agama Pacitan menggunakan kaidah diatas dalam menyelesaikan atau mengabulkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan yaitu dengan menolak kerusakan ketika dihadapkan pada perkara permohonan dispensasi kawin pada calon mempelai yang saling mencintai, dan dalam kondisi mereka sudah sering bersama-sama dikehidupannya maka tentunya nikah merupakan jalan satu-satunya untuk mengatasi kemadharatan meskipun mereka belum dewasa. Selain itu pada konteks calon mempelai yang mengajukan dispensasi kawin dalam keadaan hamil maka menikahkan mereka merupakan menolak kemadharatan dikarenakan ketika tidak menikahkan mereka

maka akan terjadi madharat berupa anak yang dilahirkan tidak memiliki ayah, ibu yang hamil tidak ada yang menafkahi, dan istri yang melahirkan serta menyusui tidak ada yang menafkahi. Hal ini sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan berdasarkan kaidah diatas.

Kaidah Kedua

الصَّرْوَرَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : *Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan.*

Pada kaidah yang kedua ini pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu dengan kaidah bahwa hal yang madharat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Ketika dihadapkan pada persoalan yang mana calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada kondisi sudah hamil. Hal ini sudah dapat dikatakan darurat ketika mereka hamil diluar nikah atau mereka tidak memiliki suami maka perlu dinikahkan dikarenakan akan terjadi kemadharatan yang berkepanjangan

ketika mereka tidak diberi izin menikah. Selanjutnya pada kondisi mereka yang saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan dalam arti mereka sudah berpacaran kemana-mana sering bersama maka hal ini hukum menikah menjadi wajib. Dikarenakan ketika tidak menikah akan menimbulkan dosa. Ini merupakan suatu kewajiban nikah dikarenakan kemandharatan. Maka hal ini hakim wajib memberikan izin mereka untuk menikah dikarenakan kalau tidak menikah akan berbuat zina Meskipun mereka belum dewasa.

Kaidah Ketiga

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

Artinya: *Kemandharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemandharatan yang bersifat umum.*

Pada kaidah yang ketiga ini pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan yaitu dengan menanggung kemandharatan yang khusus daripada kemandharatan yang umum. Kemandharatan khususnya yaitu ketika mereka menikah dalam kondisi belum dewasa maka mereka akan menanggung persoalannya sendiri dari mulai perekonomian dan penyelesaian konflik-konflik

dewasa. Dan kemadharatan umumnya ketika mereka tidak menikah dan terus bersama didalam aktifitas kehidupannya maka akan menimbulkan banyak fitnah dan perzinaan yang terus menerus melakukan dosa. Dan ketika kedua orang tersebut berpisah dalam kondisi mereka sudah berzina maka akan berdampak pada orang lain yang mereka dekati selanjutnya. Imam *Shafi* dan Imam H}anafi yang membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah baik dengan yang menghamili maupun yang bukan menghamili, tetapi menurut Imam *Ma}liki* dan H}ambali tidak boleh menikahi wanita hamil di luar nikah baik dengan yang menghamili maupun yang bukan menghamili.⁴¹

⁴¹ ANWAR, Muhamad Choirul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre Di Kecamatan Parang*. 2019. PhD Thesis. IAIN Ponorogo.

BAB V

METODE HAKIM DALAM MENERAPKAN KAIDAH FIQHIYAH DALAM MENANGANI PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PACITAN

A. Data Hasil Penelitian Tentang Metode Hakim Menerapkan Kaidah Fiqhiyah Dalam Menangani Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan

Dalam penelitian ini peneliti untuk menggali tentang Implementasi kaidah Ushul Fiqh dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan dengan menggunakan beberapa Informan Ahli yang berasal dari hakim Pengadilan Agama Pacitan yang bertugas menangani kasus permohonan dispensasi Kawin dan kemudian peneliti melakukan triangulasi menggunakan Informan pembanding yang berasal dari Panitera Pengadilan Agama Pacitan.

Pengambilan informan ahli dari hakim Pengadilan Agama Pacitan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu *Pertama*, Hakim Pengadilan Agama tersebut yang bertugas

mengadili perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. *Kedua*, hakim Pengadilan Agama tersebut yang mempunyai wewenang dalam berijtihad untuk memberikan putusan pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan.

Adapun informan ahli sebagai berikut:

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN
1	Nurhabibah	Hakim Pengadilan Agama Pacitan
2	Miswan	Hakim Pengadilan Agama Pacitan
3	Munirul Ihwan	Hakim Pengadilan Agama Pacitan

Selain informan ahli kemudian peneliti menggunakan informan pembanding yang akan peneliti gunakan sebagai bahan triangulasi. Informan pembanding tersebut peneliti ambil dari panitera Pengadilan Agama Pacitan. Pengambilan informan pembanding tersebut berdasarkan pada panitera merupakan orang yang membantu hakim dalam jalannya persidangan sehingga panitera mengetahui secara jelas tentang sistematika persidangan.

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN
1	Wahyudin	Panitera Pengadilan Agama Pacitan
2	Moch Mu'ti	Panitera Pengadilan Agama Pacitan

Setelah menentukan Informan ahli dan informan pembanding selanjutnya peneliti dalam menggali informasi tentang Implementasi kaidah Ushul Fiqh dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan menggunakan pertanyaan bagaimana penerapan kaidah Ushul Fiqh dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan ?.

Menurut informan ahli Nurhabibah Implementasi kaidah Ushul Fiqh dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan sebagai berikut:

“kasus permohonan dispensasi kawin kebanyakan kasus darurat maksudnya darurat karena mereka sudah hamil duluan atau mereka ketahuan melakukan hubungan suami istri diluar nikah, sehingga hal ini sangat urgen banyak pertimbangan hakim tentang kasus ini. Ketika kita tidak mengabulkan permohonan mereka dikawatirkan akan timbul madlarat berupa istri yang mengandung tidak ada yang menafkahi dan anak yang dilahirkan tidak memiliki ayahnya. Sehingga kami para hakim menggunakan kaidah

Ushul Fiqh dalam menentukan dasar-dasar pengambilan keputusan tersebut.”⁴²

Dari hasil wawancara dengan informan ahli yang pertama dengan Nurhabibah menjelaskan bahwa Implementasi kaidah Ushul Fiqh dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama yaitu penerapan kaidah tersebut digunakan sebagai dasar hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dikarenakan orang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam kondisi darurat yang mana apabila tidak dikabulkan akan terjadi kemadharatan dalam kehidupan pihak perempuan dan anak yang dikandungnya.

Selanjutnya setelah peneliti menggali informasi terhadap informan pertama kemudian menggali informasi kepada informan kedua yaitu dengan Miswan seperti yang dijelaskan oleh Miswan sebagai berikut:

“implementasinya ya begini. Karena semua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut dikarenakan dalam posisi urgen yang mana mereka sudah dalam keadaan hamil duluan akibat pergaulan bebas.

⁴² Nurhabibah, Pukul 14.20 WIB Rabu, 19 Oktober 2022 , Wawancara, di Pengadilan Agama Pacitan

Sehingga kami selaku penentu kebijakan harus memutuskan berdasarkan dalil yang jelas. Sehingga kami menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh dalam memutuskan perkara tersebut”⁴³

Implementasi kaidah Ushul Fiqh dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan berdasarkan pada keadaan darurat yang dialami oleh para pihak yang mengajukan dispensasi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh kedua informan ahli tentang penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan.

Kesamaan dari informasi yang diperoleh dari kedua informan ahli selanjutnya peneliti menggali data dari informan ahli yang ketiga yaitu dengan Munirul Ihwan menurut Munirul Ihwan Implementasi kaidah Ushul Fiqh dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan dengan cara menggali tingkat kedaduratannya. Tingkat daruratnya diukur dari dampak daruratnya apabila mengabulkan dan dampak daruratnya apabila tidak mengabulkan seperti yang dijelaskan oleh Munirul Ihwan sebagai berikut:

⁴³ Miswan, Pukul 15.20 WIB Rabu, 19 Oktober 2022, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Pacitan

“kami dalam menerapkan kaidah Ushul Fiqh dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan berdasarkan pertimbangan kami tentang tingkat daruratnya ketika mengkabulkan dan ketika tidak mengkabulkan permohonan Dispensasi Kawin tersebut. Akan tetapi lebih banyak mengkabulkan dikarenakan kondisi mereka sangat urgen , ketika anak perempuan mereka sudah dalam keadaan hamil dan umur anak mereka masih dibawah umur 16 tahun maka satu-satunya mereka harus menikahkan putrinya tersebut dikarenakan apabila tidak dinikahkan laki-laki yang menghamilinya dikawatirkan akan kabur meninggalkannya.”⁴⁴

Dari hasil wawancara peneliti kepada ketiga informan ahli menyimpulkan bahwa terdapat beberapa point Implementasi kaidah Ushul Fiqh dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Point tersebut antara lain:

- a. Kaidah Ushul Fiqh digunakan dalam keadaan darurat
- b. Kaidah Ushul Fiqh digunakan dengan mengukur tingkat daruratnya lebih besar yang mana antara mengkabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.

⁴⁴ Munirul Ihwan, Pukul 15.20 WIB Rabu, 19 Oktober 2022, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Pacitan

Dari kedua point tersebut kemudian peneliti melakukan triangulasi dengan informan pembanding. Dalam informan pembanding ini peneliti menggunakan Wahyudin sebagai panitera Pengadilan Agama Pacitan menurutnya :

“seperti yang saya lihat ketika kami mengikuti persidangan kami melihat penerapan kaidah Ushul Fiqh dengan cara mempertimbangkan besar mana madlarat apabila menolak dan mengabulkan perkara dispensasi kawin tersebut. Selain itu penerapan kaidah tersebut berdasarkan kondisi pihak yang mengajukan perkara tersebut sangat mendesak dalam kondisi seperti itu pasti orang tua akan depresi apabila anaknya tidak jadi menikah”⁴⁵

Data dari informan pembanding memiliki kesamaan bahwa Implementasi kaidah Ushul Fiqh dalam mengatasi permohonan dispensasi kawin berdasarkan dengan keadaan yang darurat. Kemudian peneliti menggali data lagi melalui wawancara kepada informan pembanding yang kedua seperti yang dijelaskan:

“ohh implementasi nggih pak. Implementasi kaidah ushul Fiqh dalam mengatasi perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan itu berdasarkan tingkat daruratnya kasus dan yang kedua memang keadaan

⁴⁵ Wahyudin15.21 WIB 26 oktober 2022, Wawancara, di Pengadilan Agama Pacitan.

darurat. Ya seperti yang kita bayangkan saja apabila putri kita hamil atau digrebek masyarakat akibat pergaulan bebas dan sementara putri kita masih dibawah umur satu-satunya jalan untuk memperbaiki untuk menikahkan mereka meskipun mereka belum dewasa akantetapi mau bagaimana lagi”⁴⁶

Dari hasil penggalian sumber data melalui wawancara kepada beberapa informan ahli dan peneliti triangulasi menggunakan informan pembanding menghasilkan kesimpulan bahwa Implementasi kaidah Ushul Fiqh dalam perkara dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- a. Kaidah Ushul Fiqh digunakan dalam keadaan darurat
- b. Kaidah Ushul Fiqh digunakan dengan mengukur tingkat daruratnya lebih besar yang mana antara mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.

⁴⁶ Moch Mu'ti, SH., 15.21 WIB 26 oktober 2022 , *Wawancara*, di Pengadilan Agama Pacitan.

B. Analisis Metode Hakim Menerapkan Kaidah Fiqhiyah Dalam Menangani Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan menurut Kaidah Fiqhiyah

Pada tahapan ini peneliti menganalisis dengan menggunakan kaidah Fiqhiyah tentang bagaimana metode hakim dalam menerapkan kaidah Fiqhiyah pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Sesuai dengan hasil penelitian hakim dalam menggunakan kaidah-kaidah Fiqhiyah tersebut dengan menggunakan beberapa pertimbangan *Pertama*, kasus yang mereka hadapi dalam kondisi darurat. *Kedua*, terdapat dua kemadharatan antara mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut,. *Ketiga* mempertimbangkan dari kedua madharat antara mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.

Sesuai dengan tujuan Kaidah Fiqhiyah dalam menjaga dan melindungi kelima aspek yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka dengan ini penerapan kaidah Fiqhiyah bertujuan untuk meminimalisir madharat yang disebabkan dari permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan tersebut. Dalam hal ini kaidah Fiqhiyah yang

digunakan sebagai upaya meminimalisir saja tidak menolak kemadharatan dikarenakan kasus yang terjadi alasan permohonan dispensasi kawin mereka dalam kondisi sudah hamil atau sering bersama dalam setiap aktifitas sehingga dikawatirkan akan menyebabkan perzinaan. Dan dalam kondisi lain mereka belum cukup umur dalam arti belum mampu dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan mereka hadapi ketika menikah. Karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku pernikahan hanya diperbolehkan pada orang laki-laki di atas 19 tahun dan perempuan diatas 16 tahun menurutnya pernikahan yang dilakukan pada umur dibawah batasan tersebut akan menyebabkan konflik dikarenakan faktor kurang dewasa.

Sehingga pada hal ini metode yang dilakukan hakim dalam menerapkan kaidah Fiqhiyah pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan dengan mempertimbangkan beberapa faktor penyebab permohonan tersebut. Ketika faktor penyebab dari permohonan tersebut dihadapkan kedua pilihan yang sama-sama terdapat unsur madharatnya maka dengan menggunakan kaidah Fiqhiyah hakim mengambil kemadharatan yang lebih ringan daripada

kemadharatan yang lebih besar. Hal itu dilakukan dengan tujuan menjaga kelima aspek kaidah Fiqhiyah yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.



BAB VI

IMPLIKASI DARI PENERAPAN KAIDAH FIQHIYAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MENANGANI PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PACITAN

A. Data Implikasi Dari Penerapan Kaidah Fiqhiyah Terhadap Putusan Hakim Dalam Menangani Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan

Setelah membahas tentang implementasi kaidah Ushul Fiqh pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahap ini peneliti akan membahas tentang bagaimana Implikasi dari Implementasi kaidah Ushul Fiqh di Pengadilan Agama Pacitan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan ahli dari hakim Pengadilan Agama Pacitan yang memiliki tugas memutuskan segala perkara di Pengadilan Agama Pacitan. Adapun informan ahli sebagai berikut:

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN
1	Nurhabibah	Hakim Pengadilan Agama Pacitan

2	Miswan	Hakim Pengadilan Agama Pacitan
3	Munirul Ihwan	Hakim Pengadilan Agama Pacitan

Setelah menentukan informan ahli selanjutnya peneliti menentukan informan pembanding sebagai bahan untuk melakukan triangulasi atau mengecek kebenaran dari informasi yang peneliti peroleh dari informan ahli. Pengambilan informan pembanding tersebut peneliti ambil dari panitera Pengadilan Agama Pacitan dan beberapa orang yang berperkara di Pengadilan Agama Pacitan. Informan tersebut antara lain :

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN
1	Wahyudin	Panitera Pengadilan Agama Pacitan
2	Tri Yani	Yang Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan
3	Sri Mutianingsih	Yang Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan
4	Indah nur Pratiwi	Yang Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan

5	Arinta ani prayogi	Yang Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan
---	--------------------	--

Untuk menggali sumber data tentang Implikasi dari Implementasi kaidah Ushul Fiqh di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Peneliti merumuskan bahwa implikasi merupakan suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal maka dengan demikian dapat diartikan dampak yang muncul dari implementasi kaidah *Ushul Fiqh* tersebut. Untuk menggali sumber data tentang Implikasi dari Implementasi kaidah Ushul Fiqh di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Maka peneliti menggunakan bahan pertanyaan berupa Bagaimana Implikasi dari Implementasi kaidah Ushul Fiqh di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

Menurut informan ahli dari Nurhabibah sebagai berikut:

“implikasi dari penerapan kaidah Ushul Fiqh di Pengadilan Agama Pacitan yaitu pertama permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan dengan dalil sesuai hukum islam, kedua pihak yang mengajukan dispensasi kawin akan merasakan kesenangan karena permohonannya dikabulkan dan putrinya

diperbolehkan untuk menikah, ketiga hakim merasa tenang dalam memutuskan perkara berdasarkan dalil yang kuat, keempat anak yang dalam kandungan atau anak dari hasil perzinaan memiliki ayah kandung”⁴⁷

Dari hasil wawancara kepada informan ahli pertama menghasilkan data yang peneliti kelompokkan dalam 4 (empat) point antara lain:

1. permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan dengan dalil sesuai hukum islam
2. pihak yang mengajukan dispensasi kawin akan merasakan kesenangan karena permohonannya dikabulkan dan putrinya diperbolehkan untuk menikah
3. hakim merasa tenang dalam memutuskan perkara berdasarkan dalil yang kuat
4. anak yang dalam kandungan atau anak dari hasil perzinaan memiliki ayah kandung

Dari hasil wawancara kepada informan ahli pertama selanjutnya peneliti menggali sumber data dari informan ahli yang kedua yaitu dengan Miswan selaku hakim Pengadilan Agama Pacitan menurutnya sebagai berikut:

⁴⁷ Wahyudin15.21 WIB 26 oktober 2022, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Pacitan.

*“Implikasinya ya kami merasa plong menghadapi masalah tersebut tidak susah-susah mencari dasar dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Memang benar-benar darurat. Ketika setiap perkara dispensasi kawin yang masuk berawal dari pergaulan bebas yang mengakibatkan mereka hamil diluar nikah. Implikasinya yaitu pertama, para hakim puas dalam memutuskan perkara tersebut, kedua pihak yang mengajukan dispensasi kawin merasa puas dengan putusan dari Pengadilan Agama Pacitan”.*⁴⁸

Dari hasil wawancara kepada informan yang kedua peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat dua point implikasi dari implementasi kaidah Ushul Fiqh di Pengadilan Agama Pacitan yaitu:

1. merasa bertanggungjawab menghadapi masalah tersebut tidak susah-susah mencari dasar dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin
2. pihak yang mengajukan dispensasi kawin merasa puas dengan putusan dari Pengadilan Agama Pacitan

Setelah melakukan wawancara kepada informan ahli yang kedua selanjutnya wawancara kepada informan ahli yang ketiga yaitu dengan Munirul Ihwan selaku hakim Pengadilan

⁴⁸ Tri Yani. Pukul 12.13 WIB, 26 Oktober 2022, *Wawancara*, di Kantin Pengadilan Agama Pacitan

Agama Pacitan dalam wawancara tersebut seperti yang dijelaskan oleh Munirul Ihwan sebagai berikut:

“kalau menurut saya implikasi itu kan artinya dampak kan ? kalau dampak berarti ada dampak baik dan buruk jadi menurut saya dampak baik dan buruk dari implementasi kaidah Ushul Fiqh di Pengadilan Agama Pacitan tersebut adalah dampak baik dan buruk pada Pengadilan Agama dampak baiknya Pengadilan Agama mendapatkan rating yang bagus karena memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai yang diharapkan oleh masyarakat sementara dampak buruknya adalah ketika masyarakat memandang banyak kasus permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan maka dikawatirkan akan terjadi banyak lagi perkara dispensasi kawin yang didaftarkan kepada Pengadilan Agama Pacitan. Selain itu dampak baik bagi yang dikabulkan adalah pihak istri yang mengandung dan anak yang dikandungnya memiliki orang yang siap bertanggungjawab dan dampak buruknya pernikahan yang dialami oleh orang yang belum dewasa maka banyak persoalan-persoalan yang akan membuat mentalnya harus siap menanggung beban berat.”⁴⁹

Setelah peneliti melakukan penggalan sumber data dari informan ahli yang ketiga maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa implikasi dari implementasi kaidah Ushul Fiqh di

⁴⁹ Munirul Ihwan, Pukul 15.20 WIB Rabu, 19 Oktober 2022, Wawancara, di Pengadilan Agama Pacitan

Pengadilan Agama Pacitan sebagai berikut: implikasi yang memiliki sinonim kata dampak maka terdapat dampak baik dan buruk.

1. Implikasi terhadap Pengadilan Agama Pacitan

- a. Dampak Baiknya : Pengadilan Agama mendapatkan rating yang bagus karena memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai yang diharapkan oleh masyarakat
- b. Dampak Buruk : ketika masyarakat memandang banyak kasus permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan maka dikawatirkan akan terjadi banyak lagi perkara dispensasi kawin yang didaftarkan kepada Pengadilan Agama Pacitan

2. Implikasi kepada pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin

- a. Dampak Baik : pihak istri yang mengandung dan anak yang dikandungnya memiliki orang yang siap bertanggungjawab
- b. Dampak Buruk : pernikahan yang dialami oleh orang yang belum dewasa maka banyak persoalan-persoalan

yang akan membuat mentalnya harus siap menanggung beban berat

Dari hasil wawancara kepada ketiga informan ahli tentang implikasi dari implementasi kaidah Ushul Fiqh di Pengadilan Agama Pacitan dapat di kelompokkan kepada beberapa point sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap Pengadilan Agama Pacitan

a. Dampak Baiknya :

- Pengadilan Agama mendapatkan rating yang bagus karena memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai yang diharapkan oleh masyarakat
- permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan dengan dalil sesuai hukum islam
- hakim merasa tenang dalam memutuskan perkara berdasarkan dalil yang kuat
- Hakim merasa bertanggungjawab menghadapi masalah tersebut tidak susah-susah mencari dasar dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin

b. Dampak Buruk :

- ketika masyarakat memandang banyak kasus permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan

maka dikawatirkan akan terjadi banyak lagi perkara dispensasi kawin yang didaftarkan kepada Pengadilan Agama Pacitan

2. Implikasi kepada pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin

a. Dampak Baik :

- pihak istri yang mengandung dan anak yang dikandungnya memiliki orang yang siap bertanggungjawab
- pihak yang mengajukan dispensasi kawin akan merasakan kesenangan karena permohonannya dikabulkan dan putrinya diperbolehkan untuk menikah
- anak yang dalam kandungan atau anak dari hasil perzinaan memiliki ayah kandung
- pihak yang mengajukan dispensasi kawin merasa puas dengan putusan dari Pengadilan Agama Pacitan

b. Dampak Buruk :

- pernikahan yang dialami oleh orang yang belum dewasa maka banyak persoalan-persoalan yang

akan membuat mentalnya harus siap menanggung beban berat

Setelah melakukan penggalian dari ketiga informan ahli kemudian peneliti melakukan triangulasi menggunakan informan pembanding. Dalam hal ini penentuan informan pembanding peneliti ambil dari salah satu Panitera Pengadilan Agama Pacitan dan juga orang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan. Menurut Wahyudin sebagai berikut:

“implikasi dari implementasi kaidah Ushul Fiqh dipengadilan agama sangat membantu jalannya proses persidangan para hakim sangat terbantu dengan adanya kaidah tersebut kemudian pihak-pihak yang mengajukan dispensasi kawin tidak kecewa dikarenakan pengajuan mereka dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Pacitan.”⁵⁰

Selain kepada informan pembanding yang dari jalur pegawai Pengadilan Agama Pacitan selanjutnya peneliti melakukan triangulasi dengan menggunakan informan dari jalur orang yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan menurut Tri Yani sebagai berikut:

⁵⁰ Wahyudin15.21 WIB 26 oktober 2022 , *Wawancara*, di Pengadilan Agama Pacitan.

“dengan adanya penerapan kaidah Ushul Fiqh ini dapat membantu dan mempermudah kami dalam menghadapi masalah karena memang ini bukan keinginan kami mengajukan dispensasi kawin kalau bukan jalan terakhir dan urgen saya pun tidak mungkin mengajukan permohonan dispensasi kawin putrid saya. Dengan penerapan kaidah-kaidah Ushul Fiqh ini menjadikan hakim lebih professional dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini”⁵¹.

Berdasarkan data hasil wawancara kepada beberapa informan ahli dan kemudian peneliti triangulasi menggunakan beberapa data dari informan pembanding maka peneliti menarik kesimpulan bahwa implikasi dari implementasi kaidah-kaidah Ushul Fiqh di Pengadilan Agama Pacitan sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap Pengadilan Agama Pacitan

a. Dampak Baiknya :

- Pengadilan Agama mendapatkan rating yang bagus karena memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai yang diharapkan oleh masyarakat

⁵¹ Tri Yani. Pukul 12.13 WIB, 26 Oktober 2022 , *Wawancara*, di Kantin Pengadilan Agama Pacitan

- permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan dengan dalil sesuai hukum islam
- hakim merasa tenang dalam memutuskan perkara berdasarkan dalil yang kuat
- Hakim merasa bertanggungjawab menghadapi masalah tersebut tidak susah-susah mencari dasar dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin

b. Dampak Buruk :

- ketika masyarakat memandang banyak kasus permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan maka dikawatirkan akan terjadi banyak lagi perkara dispensasi kawin yang didaftarkan kepada Pengadilan Agama Pacitan

2. Implikasi kepada pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin

a. Dampak Baik :

- pihak istri yang mengandung dan anak yang dikandungnya memiliki orang yang siap bertanggungjawab
- pihak yang mengajukan dispensasi kawin akan merasakan kesenangan karena permohonannya

dikabulkan dan putrinya diperbolehkan untuk menikah

- anak yang dalam kandungan atau anak dari hasil perzinaan memiliki ayah kandung
- pihak yang mengajukan dispensasi kawin merasa puas dengan putusan dari Pengadilan Agama Pacitan

b. Dampak Buruk :

- pernikahan yang dialami oleh orang yang belum dewasa maka banyak persoalan-persoalan yang akan membuat mentalnya harus siap menanggung beban berat.

B. Analisis Implikasi Dari Penerapan Kaidah Fiqhiyah Terhadap Putusan Hakim Dalam Menangani Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan menurut Tujuan Kaidah Fiqhiyah

Pada tahapan ini peneliti melakukan analisis dengan menggunakan tujuan dari Kaidah Fiqhiyah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk menganalisis dengan menggunakan teori kaidah Fiqhiyah maka peneliti menentukan beberapa aspek yang peneliti peroleh dari hasil

penelitian tentang implikasi dari penerapan kaidah tersebut dalam mempertimbangkan putusan terkait dispensasi kawin.

Setelah melakukan penelitian dengan metode wawancara tentang implikasi dari penerapan kaidah Fiqhiyah terhadap putusan hakim dalam menangani perkara Dispensasi Kawin di pengadilan agama pacitan maka terdapat kedua implikasi yaitu implikasi baik dan buruk sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap Pengadilan Agama Pacitan

a. Dampak Baiknya :

- Pengadilan Agama mendapatkan rating yang bagus karena memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai yang diharapkan oleh masyarakat
- permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan dengan dalil sesuai hukum islam
- hakim merasa tenang dalam memutuskan perkara berdasarkan dalil yang kuat
- Hakim merasa bertanggungjawab menghadapi masalah tersebut tidak susah-susah mencari dasar dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin

b. Dampak Buruk :

- ketika masyarakat memandang banyak kasus permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan maka dikawatirkan akan terjadi banyak lagi perkara dispensasi kawin yang didaftarkan kepada Pengadilan Agama Pacitan
2. Implikasi kepada pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin
- a. Dampak Baik :
- pihak istri yang mengandung dan anak yang dikandungnya memiliki orang yang siap bertanggungjawab
 - pihak yang mengajukan dispensasi kawin akan merasakan kesenangan karena permohonannya dikabulkan dan putrinya diperbolehkan untuk menikah
 - anak yang dalam kandungan atau anak dari hasil perzinahan memiliki ayah kandung
 - pihak yang mengajukan dispensasi kawin merasa puas dengan putusan dari Pengadilan Agama Pacitan
- b. Dampak Buruk :

- pernikahan yang dialami oleh orang yang belum dewasa maka banyak persoalan-persoalan yang akan membuat mentalnya harus siap menanggung beban berat.

Dari hasil penelitian seperti yang sudah peneliti paparkan diatas maka ketika hal tersebut dianalisis dengan menggunakan tujuan dari Kaidah Fiqhiyah yaitu menjaga kelima aspek berupa Agama, Jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka hal ini implikasi penerapan kaidah Fiqhiyah dalam menyelesaikan perkara dispensasi Kawin di Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga Agama

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan dapat diselesaikan dengan menggunakan dasar hukum sesuai dengan hukum islam. Hal tersebut dapat dikatakan dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan hukum-hukum sesuai peraturan agama. Sehingga eksistensi hukum islam tetap berkembang dan digunakan seiringnya berkembangnya zaman.

2. Menjaga Jiwa

Dengan adanya penerapan kaidah Fiqhiyah sehingga permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan dengan

beberapa pertimbangan sesuai dengan kaidah Fiqhiyah. Hal ini maka tentunya pihak istri yang mengandung anak dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya sehingga kehidupan anaknya dan dirinya dinafkahi oleh suaminya.

3. Menjaga Akal

Terkait menjaga akal dalam hal ini dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin maka pihak yang mengajukan dispensasi kawin akan merasakan kesenangan karena permohonannya dikabulkan dan putrinya diperbolehkan untuk menikah. Sehingga beban fikiran atau beban mental yang mereka hadapi terasa teratasi.

4. Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan dalam hal ini implikasi dari penerapan Kaidah Fiqhiyah tersebut dapat menjaga keturunan yang mana anak yang dikandung tersebut memiliki ayah secara resmi. Meskipun hal tersebut tidak bernasab dengan ayahnya. Setidaknya dalam akte kelahiran anaknya tersebut memiliki ayah laki-laki yang menghamili ibunya tersebut.

5. Menjaga Harta

Terkait menjaga harta implikasi dari penerapan kaidah Fiqhiyah tersebut maka memperbolehkan anak dibawah umur

menikah dengan beberapa pertimbangan salah satunya dikarenakan sudah hamil diluar nikah sehingga pihak Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Hal tersebut dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin maka dapat menjaga harta orangtuanya dikarenakan anaknya yang kondisi dihamili oleh laki-laki yang bukan suaminya sekarang sudah dapat menikah dan mau mempertanggungjawabkan dari perbuatannya tersebut.

Dari kelima aspek tujuan dari Kaidah Fiqhiyah tersebut maka Implikasi dari Penerapan kaidah Fiqhiyah dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin dipengadilan agama sudah dapat dikatakan sesuai atau selaras dari tujuan Kaidah Fiqhiyah tersebut. Hal itu berdasarkan pada hasil penelitian tentang Implikasi penerapan kaidah Fiqhiyah tersebut.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa:

1. kaidah-kaidah Fiqhiyah yang sering digunakan dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan maka terdapat 3 (tiga) Kaidah yaitu

Kaidah Pertama

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak Kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Kaidah Kedua

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : *Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan.*

Kaidah Ketiga

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

Artinya: *Kemadharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemadharatan yang bersifat umum.*

2. Implementasi kaidah Ushul Fiqh dalam perkara dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan sebagai berikut:
 - a. Kaidah Ushul Fiqh digunakan dalam keadaan darurat
 - b. Kaidah Ushul Fiqh digunakan dengan mengukur tingkat daruratnya lebih besar yang mana antara mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.
3. implikasi dari implementasi kaidah-kaidah Ushul Fiqh di Pengadilan Agama Pacitan sebagai berikut:
 - a. Implikasi terhadap Pengadilan Agama Pacitan
 - 1) Dampak Baiknya :
 - Pengadilan Agama mendapatkan rating yang bagus karena memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai yang diharapkan oleh masyarakat
 - permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan dengan dalil sesuai hukum islam
 - hakim merasa tenang dalam memutuskan perkara berdasarkan dalil yang kuat

- Hakim merasa bertanggungjawab menghadapi masalah tersebut tidak susah-susah mencari dasar dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin

2) Dampak Buruk :

- ketika masyarakat memandang banyak kasus permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan maka dikawatirkan akan terjadi banyak lagi perkara dispensasi kawin yang didaftarkan kepada Pengadilan Agama Pacitan

b. Implikasi kepada pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin

1) Dampak Baik :

- pihak istri yang mengandung dan anak yang dikandungnya memiliki orang yang siap bertanggungjawab
- pihak yang mengajukan dispensasi kawin akan merasakan kesenangan karena permohonannya dikabulkan dan putrinya diperbolehkan untuk menikah
- anak yang dalam kandungan atau anak dari hasil perzinahan memiliki ayah kandung

- pihak yang mengajukan dispensasi kawin merasa puas dengan putusan dari Pengadilan Agama Pacitan
- 2) Dampak Buruk :
- pernikahan yang dialami oleh orang yang belum dewasa maka banyak persoalan-persoalan yang akan membuat mentalnya harus siap menanggung beban berat

B. Saran-saran

1. Bagi Pengadilan Agama Pacitan untuk selalu menjaga eksistensi dalam melakukan ijtihad dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.
2. Bagi pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk membimbing keluarga anaknya meskipun pengadilan sudah mengabulkan permohonan dispensasi kawin akan tetapi anak tersebut masih dibawah umur dan masih jauh dari kedewasaan dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

“DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR 0060/PDT.P/2015/PA.PBR) Oleh : Mentari Gemilang” III, no. 0060 (2015): 1–13.

Abdul Aziz M. Azzam, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah*, Kairo: Daar al-Hadits, 2005.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Daar- ar-Rasyid: 2008),

Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Pekalongan: STAIN Press, cet.2, 2006),

Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),

Anwar, M. C. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre Di Kecamatan Parang* (Doctoral dissertation, Iain Ponorogo, 2019).

D Novindasari, PR Listyawati - Prosiding Konstelasi Ilmiah, and undefined 2021, “Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin,” *Jurnal.Unissula.Ac.Id*, no. 2 (2021): 60–73, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/17895>.

- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
- Fatma Amalia, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 8, no. 2 (2009): 201.
- Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka, 1994), 140.
- Ibn Ashur, *Treatise on Maqasid al-Shari‘ah*, *Terj. Mohammad El-Taher El-Mesawi*. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006),
- Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid. VIII (Beirut: Dar al-Sadr, t.th),
- Indonesia, *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama*, Peraturan
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991, Pasal 15.
- Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. 1 LN. 1 tahun 1974, TLN. No. 3019, Pasal 21 ayat 1 dan 2.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 1997), h. 230-245. *Dan Muhlis Usman, Kaidah-Kaidah Fiqhiyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 1996),

- Merujuk kepada surah al-Nisa, (4): 59. *Lihat juga dalam Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta: Kencana: 2009),
- Miftahul A, A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: kaidah-kaidah Penetapan hukum Islam*, (Surabaya: CV. Citra Media, 1997),
- Mukhtar yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: al-Ma“arif: 1993),
- Novindasari, *Ilmiah, and 2021, “Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin.”*
- Nidhami, Muhammad Shofwan. *Perlindungan Hak Anak Dalam Perkara Anak Di Pengadilan Agama Jakarta Timur (Perspektif Sadd Al-Dzari‘ Ah)*. MS thesis. Fakultas Al-Shariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rizkiyah Hasanah, “*Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari‘ Ah* Rizkiyah Hasanah Hakim Pengadilan Agama Jember, Tujuan Pernikahan Baik Menurut Hukum Positif Yaitu Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ma,” *Aktualita* 1, no. 1 (2018): 295–311.
- Rizkiyah Hasanah, “*Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari‘ Ah* Rizkiyah Hasanah Hakim Pengadilan Agama Jember Tujuan Pernikahan Baik Menurut Hukum

Positif Yaitu Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ”

Said al-Khin, Mustafa, Atsaru Al-Khilaf Al-Qawaid Al-Ushuliyah Fi Al-Ikhtilafi Al Fuqaha, (Beirut, muassasah ar-risalah 1998),

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana: 2005),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2003),

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rinekan Cipta, 2002),.

Sya'bani, A. (2015). Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Metode Ijtihad. *El-Hikam*, 8(1),

T. Fatimah Djajasudarma, *Metode Linguistik (Ancangan Metode Penelitian dan Kajian)*, (Bandung: Refika Aditama, 2006),

T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang: 1981),

Lampiran 01, *Daftar Pertanyaan*

Informan Ahli :	
1. Nurhabibah (Hakim Pengadilan Agama Pacitan)	
2. Miswan (Hakim Pengadilan Agama Pacitan)	
3. Munirul Ihwan (Hakim Pengadilan Agama Pacitan)	
1	Bagaimana pandangan hakim terhadap kaidah Fiqhiyah sebagai argumentasi atau pertimbangan hukum dalam menangani perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan ?
2	Bagaimana hakim menerapkan kaidah Fiqhiyah dalam menangani perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan ?
3	Bagaimana Implikasi dari penerapan kaidah Fiqhiyah terhadap putusan hakim dalam menangani perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan ?

Informan Pembanding :

1. Wahyudin (Panitera Pengadilan Agama Pacitan)
2. Tri Yani (Yang Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan)
3. Sri Mutianingsih (Yang Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan)
4. Indah nur Pratiwi (Yang Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan)
5. Arinta ani prayogi (Yang Mengajukan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan)

1	Bagaimana pandangan hakim terhadap kaidah Fiqhiyah sebagai argumentasi atau pertimbangan hukum dalam menangani perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan ?
2	Bagaimana hakim menerapkan kaidah Fiqhiyah dalam menangani perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan ?
3	Bagaimana Implikasi dari penerapan kaidah Fiqhiyah terhadap putusan hakim dalam menangani perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan ?